

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA HUKUM

Urgensi Pengawasan dan *Checks and Balances*

Penulis :
Achmad Miftah Farid, S.H., M.H



CV. STRATA PERSADA ACADEMIA

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Urgensi Pengawasan dan *Checks and Balances*

Penulis:

Achmad Miftah Farid, S.H., M.H

Editor:

Zaid, S.M., M.H

Desain Cover:

Riswanda Imawan

Tata Letak:

Azmi Asyfia

Ukuran:

i-iv, 1-138, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

978-623-09-4869-5

Cetakan Pertama:

Juli 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by CV. Strata Persada Academia

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU
MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI
TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

PENERBIT:

CV. Strata Persada Academia

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: www.stratapersada.com

Instagram: [@stratapersada](https://www.instagram.com/stratapersada)

Email: admin@stratapersada.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA HUKUM: Urgensi Pengawasan dan *Checks and Balances*."

Saat ini, keberadaan negara hukum telah menjadi dasar utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan di berbagai belahan dunia. Dalam konteks tersebut, salah satu pilar penting yang mendukung tegaknya negara hukum adalah kekuasaan kehakiman. Bagaimana pun, penggunaan kekuasaan oleh para hakim tidak boleh terlepas dari pengawasan yang ketat dan kritis untuk memastikan integritas dan independensi lembaga kehakiman.

Buku ini, berjudul "KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA HUKUM: Urgensi Pengawasan dan *Checks and Balances*," mengajak Anda untuk mengeksplorasi esensi penting dari peran kehakiman dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum. Kami percaya bahwa kekuasaan kehakiman yang tidak diawasi dengan baik dapat membahayakan prinsip-prinsip mendasar negara hukum dan mencoreng keyakinan publik terhadap sistem peradilan.

Dengan penuh ketekunan, buku ini menjelaskan secara normatif pentingnya pengawasan hakim sebagai mekanisme yang mengatur dan menegakkan batas-batas kekuasaan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merusak fondasi demokrasi. Pembaca akan diajak melihat perspektif yang luas dan mendalam tentang upaya mewujudkan sistem "Check and Balances," yang secara efektif menghubungkan kehakiman

dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif guna mencegah konsentrasi kekuatan dalam satu pihak.

Penulis, melalui kerangka argumen dan bukti empiris, merangkai gagasan tentang urgensi mendukung independensi kehakiman dan menghadirkan pengawasan yang transparan. Kami berharap agar buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para praktisi hukum, akademisi, pembuat kebijakan, dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Yogyakarta, 21 juli 2023

Achmad Miftah Farid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2.....	6
KEKUASAAN DAN NEGARA HUKUM	6
A. Sejarah Pemikiran Negara Hukum	6
B. Definisi dan Teori Negara Hukum	8
C. Karakteristik dan Syarat Negara Hukum	10
D. Konsep Negara Hukum.....	12
BAB 3.....	21
KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN	21
A. Sejarah Perkembangan Pemikiran dan Teori Pembagian Kekuasaan.....	21
B. Teori dan Konsep Dasar Pembagian Kekuasaan	25
C. Pembagian Kekuasaan di Indonesia	26
D. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal.....	28
E. Pembagian Kekuasaan secara Vertikal.....	30
F. Hubungan antara Pembagian Kekuasaan Lembaga Negara	32
BAB 4.....	39
KEKUASAAN DAN PRINSIP <i>CHEKCS AND BALANCES</i>	39
A. Sejarah Perkembangan dan Penerapan Prinsip <i>Checks and Balances</i>	39
B. Definisi <i>Checks and Balances</i>	41
C. <i>Checks and Balances</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	42

D. Hubungan Pembagian Kekuasaan dengan <i>Checks and Balances</i>	44
BAB 5.....	46
KEKUASAAN KEHAKIMAN	46
A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	49
B. Konsep Dasar Kekuasaan Kehakiman.....	51
C. Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	51
D. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	53
E. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Penjajahan Jepang	55
F. Kekuasaan Kehakiman Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia.....	56
G. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	57
H. Masalah Kekuasaan Kehakiman	60
BAB 6.....	62
FUNGSI PENGAWASAN DARI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN	62
A. Dasar Hukum Kewenangan Pengawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	63
B. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung.....	86
BAB 7.....	95
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN	95
A. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI).....	95
B. Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.....	110
C. Mekanisme Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim	112
DAFTAR PUSTAKA.....	131

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press.
- Basah, Sjachran. 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmodihardjo, Dardji. Ed. Aloysius R. Entah. 2009. *Sekitar Pancasila, UUD 1945, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Fauzan, Muhammad. 2012. *Hukum Lembaga Negara: Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Kadir, Adies. 2018. *Menyelamatkan Wakil Tuhan, Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: MerdekaBook.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*. Jakarta, 2003.
- Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Bagir. 1995. "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia", dalam M. Scheltema (Ed.), *De Rechstaat*. Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung.
- _____. 1998. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya: FH Unair.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- S. Lev, Daniel. 2014. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Terj.) Nirwono dan A.E. Priyono. Jakarta: LP3ES.
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sihombing, Eka Nam. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, HAW. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Perkembangan Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute - Van Vollenhoven Institute.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal, Karya Ilmiah, Majalah Hukum
- Alkotsar, Artidjo. 2005. "Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa.", dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX. No. 238, Jakarta.
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Unsrat Vol. II No.2 April-Juni 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer". *Paper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.
- Bushtami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan *Checks and Balances* ke dalam Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 13. No. 3 September 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Entah, Aloysius R. "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila", *Artikel Seminar Nasional Hukum*, FH UNNES, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Fauzan, Muhammad. "Eksistensi Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan yang Seharusnya Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 8 No. 1, Januari 2008.
- _____. "Pasang Surut Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 12 No. 1, Januari 2012.
- Haryanti, Sri. "Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Gloria Yuris*, FH Untan, Vol. 4 No. 3, April 2016.
- Kartono, "Politik Hukum *Judicial Review* di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 11 No. 2, Edisi Khusus Februari 2011.
- Manan, Bagir. 2005. "Restrukturisasi Badan Peradilan", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 239, Jakarta.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018: 171 - 178, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Martius, Ahmad Havizh. "Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 61.
- N.B., Elisabeth. "Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

- Nasution, Bahder Johan. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Pujiyono, "Rekonstruksi Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, Januari 2012.
- Riris Ardhanariswari, "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Peninjauan Kembali di Indonesia", dalam *International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS) Universitas Jenderal Soedirman 25-26 September 2018. SHS Web of Conferences Vol. 54, 02006 (2018) ICoL GaS 2018. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402006>* diakses tanggal 3 Juli 2019.
- Satyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Dintinjau dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2013.
- Sayuti, "Konsep *Rechtsstaat* dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Dr. Azhari)", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan NALAR FIQH*, Vol. 4 No. 2, Desember 2011
- Sulaiman, "Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)", *Artikel Seminar Nasional Hukum*, FH UNNES, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan di bawahnya", *Jurnal Media Hukum*, Mahkamah Konstitusi Vol. 19 No. 1 Juni 2012.
- Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016.
- Disertasi
- Soemitro, Rochmat. 1976. "Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia", *Disertasi Doktor*. Bandung: Eresco.

Seminar, Kuliah Umum

Phillips A. Kana, Kuliah “Negara Hukum dan Demokrasi” pada Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta, (Pendidikan dan Latihan Calon Hakim PTUN Jakarta tgl. 15 November 2008).

Kamus

Soebekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. 1998. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., Jabatan Hakim Yustisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Maret 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 005/PUU-IV/2006
Internet

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/180-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka-dan-bertanggung-jawab-di-mahkamah-agung.html> diakses tanggal 5 Februari 2019.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 6 Februari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Urusan_Administrasi_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/sejarah> diakses tanggal 11 Februari 2019.

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/tugas-a-fungsi> diakses tanggal 11 Februari 2019.

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/struktur-organisasi> diakses tanggal 11 Februari 2019.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-mahkamah-agung-ri> diakses tanggal 20 Februari 2019.

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/#> diakses tanggal 22 Maret 2019.

https://siwas.mahkamahagung.go.id/#faqs_siwas diakses tanggal 22 Maret 2019.

https://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news_detail/959/ky-terima-laporan-masyarakat-di-semester-i-2019 diakses tanggal 14 Agustus 2019.